

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja organisasi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak belum berjalan dengan baik, karena dalam penanganannya mengalami beberapa kendala. Belum baiknya kinerja dinas dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pertama dilihat dari aspek personal atau individu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang. Jika dilihat dari pengetahuannya, para pegawai telah cukup bagus terbukti dengan pahamnya para pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya Kemudian keterampilan dan kemampuan

pegawai juga mempengaruhi kinerja dinas. Dimana para pegawai telah mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ada dengan cukup baik. Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan kasus dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki oleh individu masing-masing pegawai serta dorongan dari atasan, dalam hal ini motivasi dari pimpinan sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya kenaikan jabatan jika para pegawai bekerja dengan baik dan mampu mencapai target.

2. Faktor kedua dilihat dari aspek kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang sudah cukup baik. Dimana pemimpin mampu mempengaruhi para pegawai agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan, pemimpin mampu mengambil tindakan apa yang baik untuk kepentingan organisasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, diterimanya peran pemimpin oleh para pegawai serta diterangkannya dengan baik oleh pemimpin tugas masing-masing pegawai.
3. Faktor ketiga dilihat dari aspek tim dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama antara sesama anggota kelompok berjalan dengan baik terbukti dengan komunikasi yang terjalin antar sesama anggota kelompok serta dihargainya kinerja kelompok oleh pimpinan. Dimana jika pegawai bekerja dengan baik dan mampu mencapai target adanya kenaikan jabatan yang akan diperoleh bagi pegawai yang memiliki performa kinerja dengan baik.
4. Faktor keempat dilihat dari aspek sistem Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang. Adanya sistem kerja yang jelas terbukti dengan adanya tujuan dan

sasaran, penyusunan program dan kegiatan serta adanya penyusunan anggaran yang jelas. Selain sistem, infrastruktur yang dimiliki dinas juga mempengaruhi kinerja anggota pegawai dimana infrastruktur dinas sudah cukup memadai dengan adanya mobil perlindungan dan motor perlindungan. Hanya saja dinas masih belum memiliki rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan sehingga dinas dalam memberikan pelayanan kepada korban yang membutuhkan keamanan dari pelaku masih terbatas.

5. Faktor kelima dilihat dari aspek kontekstual (perubahan lingkungan internal dan eksternal) dapat disimpulkan bahwa perubahan lingkungan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang yaitu sumber daya manusia yang minim dimana Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 5 orang. Kemudian adanya tekanan dari Walikota kepada Dinas dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu diberikan perhatian ekstra. Sementara perubahan lingkungan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu teknologi, lingkungan, serta pola pikir masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak terkait.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan dari 5 faktor kinerja yang diungkapkan Mahmudi, ada 2 faktor yang mempengaruhi penurunan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang yaitu faktor personal atau individu dan faktor kontekstual. Keterbatasan pengetahuan para pegawai, tidak adanya

pelatihan kepada para pegawai dalam menangani serta melayani para korban kekerasan yang baik dan benar menyebabkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal. Sedangkan 3 faktor lainnya yaitu faktor kepemimpinan, tim dan sistem tidak mempengaruhi kinerja, tetapi masih tetap membutuhkan peningkatan terhadap ketiga faktor yang lainnya untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, rendahnya pengetahuan masyarakat serta pola pikir masyarakat yang masih enggan melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya dan merasa jika itu adalah sebuah aib jika terungkap kemudian tidak tahu kemana akan melaporkan kekerasan dan sosialisasi payung hukum yang masih rendah menyebabkan penanganan kasus tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut untuk dapat mengoptimalkan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang sehingga Dinas dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa memberikan pelayanan yang lebih prima, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi payung hukum kepada masyarakat agar dapat

memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dalam bersikap atau melakukan tindak lebih berhati-hati dan memberikan pengetahuan kepada perempuan serta anak akan hak-haknya.

- b. Melakukan kerjasama atau mengadakan MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum agar para korban mendapatkan bantuan hukum
- c. Menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi para korban sehingga para korban mendapatkan perlindungan dan rasa aman
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Plersta Padang, sehingga informasi dan data kekerasan lebih selaras
- e. Meningkatkan pengawasan dalam setiap kasus yang berjalan yang di tangani oleh instansi terkait, agar lebih jelas bagaimana jalannya kasus yang sedang di tangani.
- f. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dinas dalam memberikan pelayanan penanganan kasus kepada korban kekerasan.
- g. Sebaiknya keahlian pegawai lebih ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau pendidikan dalam menangani kekerasan sehingga kinerja pegawai lebih baik lagi kedepannya.
- h. Peningkatan kesadaran masyarakat agar mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, sehingga kekerasan tidak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan serta dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.